

25. RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BLITAR TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini merupakan rangkaian kegiatan yang berjalan simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Dengan demikian, pernyataan tahapan penyusunan Renja PD yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama pada paragraph kedua supaya disempurnakan.

Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar 2026 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025- 2029 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar tahun 2025 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar;

3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027;
4. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2026, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2026 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2026.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar tahun 2026 juga berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025 – 2029.

1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/lembaga (Renja Badan Kepegawaian Negara) dan Renja Provinsi (Renja Pengembangan Sumber Daya Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Badan Kepegawaian Negara dan Renja Pengembangan Sumber Daya Provinsi Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi dan dan pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar tahun 2026.

1.1.4 Renja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar tahun 2026 merupakan pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2026. Sedangkan RKA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2026 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2026.

Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan terjemahan perencanaan tahunan di bidang kepegawaian, sehingga bersifat lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan manajemen kepegawaian. Kebijakan perencanaan kepegawaian tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan percepatan perwujudan aparatur yang berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif).

Pada tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025 – 2029, tema pembangunan tahun 2026 *“Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Pelayanan Dasar yang didukung kualitas SDM dan Infrastruktur yang berkelanjutan”*

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar mengemban pelayanan publik dan tata kelola berkomitmen mendukung pencapaian pondasi menyiapkan SDM berkualitas untuk mewujudkan *smart governance* dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi sebagai upaya pencapaian misi 3 RPJMD. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, bersih, profesional dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan evaluasi kinerja diarahkan pada tata kelola yang akuntabel, transparan, partisipatif, berjiwa melayani, berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, serta adaptif terhadap perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar senantiasa mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan atau landasan hukum yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2);
 23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor ...);
 25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 23);
 26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
 27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2026 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2026.

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2026.

Penyusunan Renja Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diharapkan mampu mendorong tercapainya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, konsisten, terintegrasi, dan partisipatif.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam fungsinya melaksanakan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang terampil, ahli, mampu dan kompeten serta berdayaguna antaranya dengan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang pengadaan, pemberhentian dan penilaian kinerja yang meliputi pelayanan pengadaan, pemberhentian, informasi, penilaian, evaluasi kinerja dan penghargaan pegawai serta merumuskan kebijakan teknis dalam hal mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi Kewenangan Daerah dengan (tiga) program yang diampu oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Urusan Kepegawaian dijabarkan dalam Program Kepegawaian, sedangkan urusan pendidikan dan pelatihan dijabarkan dalam Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Hasil evaluasi memuat memuat telaah evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya yaitu evaluasi capaian s/d tahun 2023, 2024, dan perkiraan capaian tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target periode akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 disajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025
Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				K	K				K		
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	KEPEGAWAIAN										
	Tujuan: Meningkatkan Profesionalitas ASN	Tujuan: Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	80,5	70,89	80,3	87,14	108,52	86,75	86,75	107,76
	Sasaran: Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran: Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	Nilai	A 86,38	A 85,49	A 86,36	A 85,49	98,99	A 86,37	86,37	99,99
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	84	87	83,5	88,05	105,45	83,75	88,05	104,82
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen Perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40	10	10	10	100	10	30	75,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	32	8	8	8	100	8	24	75,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	414	108	96	96	100	93	297	71,74

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
										K	K
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	48	12	12	12	100	12	36	75,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standart	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	8	3	3	3	100	1	7	87,50
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	160	40	40	40	100	40	120	75,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	160	40	43	43	100	40	123	76,88
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standart	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	3	3	3	100	3	9	75,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	1	1	1	100	1	3	75,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	144	28	36	36	100	39	103	71,53
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	3	2	2	100	1	6	50,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	96	24	24	24	100	14	62	64,58

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun 2025		
				K	K	K	K	Tingkat Realisasi (%)		K	K	Rp
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	146	84	60	60	100	48	192	131,51	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	1	1	1	100	1	3	75,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	17	13	13	100	6	36	450,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai kebutuhan	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	12	12	12	100	12	36	75,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standart	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	40	9	10	10	100	10	29	72,50	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	388	92	80	80	100	80	252	64,95	
	Sasaran: Meningkatkan tata kelola kepegawaian sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik	Sasaran: Indeks Sistem Merit	Indeks	300	271,5	280	271,5	96,96	290	290	96,67	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data kepegawaian yang valid	%	68	68	68	84,45	124,19	73	73	107,35	
		Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan	%	74	52	61	80,34	131,7	67	67	90,54	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
				K	K	K	K		K	K	Rp
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi	%	91,58	83,15	91,18	101,65	111,48	91,38	91,38	99,78
		Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	%	51,01	18,61	46,47	37,37	80,42	48,74	48,74	95,55
		Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80	%	94,66	92	98,9	108,02	109,22	93,06	93,06	98,31
		Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	50,5	51,92	45,94	87,1	189,6	48,21	48,21	95,47
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase usulan Formasi ASN yang disetujui	%	20	97,61	97,61	100	102,45	20	20	100,00
		persentase layanan pensiun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
		persentase data kepegawaian yang dikelola	%	95	95	95	90	94,74	95	95	100,00
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	dokumen	4	1	1	1	100	1	3	75,00
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	dokumen	4	1	1	1	100	1	3	75,00
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	dokumen	48	12	12	12	100	12	36	75,00
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	1	1	1	100	1	1	100,00
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	1	1	1	1	100	1	3	300,00
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	dokumen	12	12	12	12	100	12	36	300,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun 2025		
				K	K	K	K	Tingkat Realisasi (%)		K	K	Rp
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang ditempatkan	%	70	82,4	70	64,15	91,64	70	70	100,00	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	dokumen	16	4	4	4	100	4	12	75,00	
	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase talent pool ASN yang dikelola	%	30	12,5	10	19,79	197,9	10	19,79	65,97	
	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	dokumen	48	12	12	12	100	12	36	75,00	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase SKP yang diverifikasi	%	96,16	92	93,06	99,08	106,47	94,56	94,56	98,34	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	dokumen	8	2	2	2	100	4	8	100,00	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	800	284	200	119	59,5	200	603	75,38	
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	620	170	120	120	100	120	410	66,13	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	48	12	12	12	100	12	36	75,00	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
	Sasaran: Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara	Sasaran: Persentase ASN yang mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN	%	50	75,91	49	87,1	177,76	50	50	100,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah	%	96,85	94,93	96,75	97,78	101,06	96,80	96,80	99,95	
		Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	50,5	51,92	45,94	87,1	189,6	48,21	48,21	95,47	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
										K	K
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	%	51,01	18,61	46,47	37,37	80,42	48,74	48,74	95,55
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	%	1,2	1,83	1,2	2,08	173,33	1,2	2,08	173,33
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang disusun	dokumen	48	12	12	12	100	12	36	75,00
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	4150	485	1000	2.715	271,5	1.050	4250	102,41
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	dokumen	1000	259	250	313	125,2	200	772	77,20
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	presentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi Manajerial dan Fungsional	%	15	0	10	9,42	94,2	12	12	80,00
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan	laporan	20	5	5	5	100	5	15	75,00

Capaian Kinerja pada tahun 2024 (n-2) Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. Dari tiga program, terdapat 8 indikator program, 15 (lima belas) indikator kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan:

1. Pada indikator Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi dengan target 46,47% terealisasi 37,37% atau tercapai 80,42%;
2. Indikator persentase ASN ditempatkan dengan target 70% terealisasi 64,15% tercapai 91,64%.

Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan:

1. Persentase Pemenuhan Pegawai sesuai kebutuhan dengan target 61% tercapai 80,34% yang diperoleh dari jumlah eksisting ASN Pelaksana, Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Terampil;
2. Persentase data kepegawaian yang valid tercapai 111,48%, diperoleh dari updating data dari perubahan e-master;
3. Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80 tercapai 108,02%;
4. Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi, tercapai 189,6%. Capaian yang tinggi ini karena beberapa inovasi pengembangan kompetensi yang dilaksanakan BKSDM untuk memfasilitasi melalui berbagai bentuk pengembangan kompetensi baik dilakukan secara mandiri, pola kontribusi dengan pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan, baik klasikal maupun online sampai blended learning;
5. Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah tercapai 101,06% hal tersebut didorong oleh kesadaran ASN untuk meningkatkan kapasitasnya melalui jenjang pendidikan formal;
6. Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai 105,45% atau dengan nilai IKM 88,05 Program ini menunjang seluruh kelancaran kegiatan operasional Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Blitar.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Jabatan Fungsional bersertifikat masih sangat kecil dikarenakan terbatasnya kuota pelaksanaan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga /instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikasi kompetensi;
2. Tahun 2024 terdapat masa larangan mutasi dalam rangkaian pilkada, maka mutasi pejabat harus juga mengacu Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, salah satunya melarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Untuk itu proses panjang rencana seleksi terbuka harus mendapat rekomendasi Gubernur sebelum mendapat ijin tertulis dari Mendagri.

Faktor-faktor pendorong tercapainya target kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. perencanaan kegiatan dan penganggaran dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan memperhatikan kebijakan pemerintah (terkait kebijakan Tenaga Non ASN);
2. dukungan dan koordinasi yang baik dengan Dinas Kominfotik Kota Blitar jika terapat kendala sistem dan jaringan atas pelaksanaan pelayanan administrasi digital;
3. terbangunnya komunikasi efektif dengan koordinasi dengan Kementerian PANRB dan BKN alam pelaksanaan rekrutmen CASN;
4. dukungan dari BPSDM Provinsi Jawa Timur terhadap pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program/kegiatan Renstra Perangkat Daerah antara lain:

1. Capaian kinerja yang baik berbanding lurus dengan peningkatan Indeks Profesionalitas ASN, hal tersebut menunjukkan komitmen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam tata kelola kepegawaian;
2. Terlaksananya fasilitasi program dan kegiatan dengan baik berbanding lurus dengan lancarkan pelayanan bagi internal BKPSDM maupun penerima layanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
3. Jika jumlah Jabatan Fungsional yang bersertifikat masih sangat kecil, akan berdampak pada jenjang karir pejabat fungsional tersebut;
4. Penempatan pegawai sesuai kompetensi tidak memenuhi target, dapat berdampak pada performa Perangkat Daerah.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil atas evaluasi capaian kinerja sebagai berikut:

1. Assessment Kompetensi Jabatan Pelaksana, Pengawas dan Administrator untuk mendukung pembangunan manajemen talenta;
2. Pengadaan sarana prasarana kantor atas kondisi peralatan kerja yang membutuhkan peremajaan;
3. Identifikasi kebutuhan diklat teknis sesuai kebutuhan organisasi untuk mendukung tema pembangunan tahun 2026 *“Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Pelayanan Dasar yang didukung kualitas SDM dan Infrastruktur yang berkelanjutan”*
4. Prioritas penganggaran untuk pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kosong pada tahun 2025-2026;
5. Fasilitasi diklat mandatory baik bagi pejabat struktural, fungsional maupun pegawai baru.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2022 – 2027 dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Blitar

No	Indikator	IKU/ IKK/ SKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tujuan: Indeks Profesionalitas ASN	Tujuan Renstra	80,10	80,20	80,30	80,40	53,88	70,89	86,65	86,75	86,85	87,00	Capaian IP ASN melampaui target dalam 2 tahun terakhir, Pemerintah Kota Blitar melalui BKPSDM terus berkomitmen meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelaksanaan diklat teknis, manajerial, dan fungsional serta bersama Perangkat Daerah lainnya dapat memberikan pengembangan kompetensi melalui peningkatan kapasitas, coaching mentoring kepada pegawai melalui pengembangan kompetensi terintegrasi
2	Sasaran: Indeks Sistem Merit	IKU	260	270	280	290	262	271,50	271,50	280	280	290	Didukung oleh komitmen, strategi dan program yang efektif dalam Perencanaan Kebutuhan Pegawai, pengadaan, pembinaan Karir dan Peningkatan Kompetensi, mutasi, Rotasi dan Promosi, pengelolaan Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, perlindungan serta sistem informasi yang mendukung pelaksanaan Sistem Merit
3	Sasaran: Persentase ASN yang Mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN	IKU	11,32%	13,02%	49,00%	50,00%	49,78%	75,91%	87,10%	75,00%	75,00%	75,00%	Pengembangan Kompetensi ASN melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra 2021-2026, selain karena terdapat dukungan dari BPSDM Provinsi Jawa Timur capaian ini berkat peran aktif ASN untuk meningkatkan kompetensi dengan peningkatan jenjang pendidikan, mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah, mengikuti diklat baik secara klasikal maupun daring yang sesuai dengan tupoksi, mengikuti uji kompetensi (fit & proper test) dengan hasil yang memuaskan, inovasi peningkatan pengembangan kompetensi melalui pekan kolabjar.

No	Indikator	IKU/ IKK/ SKM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Sasaran: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sasaran Renstra	A 86,30	A 86,35	A 86,36	A 86,37	A 85,16	A 85,49	A 86,47	A 86,50	A 86,50	A 86,52	Perlu komitmen pimpinan dan dukungan peran aktif dari seluruh elemen dalam Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tertib melaporkan setiap capaian kinerja secara tepat waktu dan sesuai standart.
5	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/dasar	IKK	95,79%	95,84%	95,94%	95,99%	58,98%	63,33%	64,39%	64,50%	64,50%	64,55%	Capaian IKK dalam 3 tahun terakhir masih jauh dari target, hal ini perlu upaya untuk memotifasi ASN meraih jenjang pendidikan lebih tinggi. Upaya yang telah dilakukan BKPSDM adalah dengan menerbitkan perwali Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Pencantuman Gelar Akademik pada Dokumen Kedinasan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
6	Rasio Pegawai fungsional	IKK	22,15%	22,20%	22,25%	22,30%	23,18%	24,27%	22,85%	22,85%	22,85%	22,90%	Capaian melebihi target yang meningkat dari tahun ke tahun disebabkan jumlah pegawai fungsional terus meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah dalam menetapkan formasi dalam perekrutan pegawai baru.
7	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	IKK	41,93%	44,20%	46,47%	48,74%	16,61%	17,85%	37,37%	37,50%	37,50%	37,55%	pejabat fungsional yang bersertifikat tidak memenuhi target yang ditetapkan. Jumlah pelaksanaan diklat sertifikasi pejabat fungsional sangat terpengaruh dengan adanya kuota dan jenis sertifikasi fungsional yang tersedia dari lembaga penyelenggara sertifikasi kompetensi.

Data pembentuk Capaian Kinerja Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

1. Pada indikator tujuan data pembentuk diperoleh dari pengukuran indeks profesionalitas ASN (IP ASN) diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019. Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui Dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin. Pertama, dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal. Dimensi Kedua yaitu Kompetensi digunakan untuk mengukur riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti ASN dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Ketiga, Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur penilaian kinerja yang dilakukan berdasar perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi keempat adalah dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Besaran Komponen IP ASN sebagai berikut: (1) Kualifikasi sebesar 25%; (2) Kinerja sebesar 30%; (3) kompetensi sebesar 40%; dan Disiplin sebesar 5%;
2. Pada indikator sasaran Indeks Sistem Merit yang menghitung keberhasilan terkait manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi serta kinerja secara adil dan wajar dan tanpa diskriminasi. Tujuan Sistem Merit untuk mendapatkan ASN yang professional dan berintegritas serta menempatkan ASN pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya. Data pendukung yang antara lain: 1). Perencanaan Kebutuhan sebesar 10%; 2). Pengadaan sebesar 10%; 3). Pengembangan Karir 30%; 4). Promosi dan Mutasi sebesar 10%; 5). Manajemen Kinerja sebesar 20%; 6). Penggajian, penghargaan, disiplin sebesar 10%; 7). Perlindungan dan Pelayanan sebesar 4 %; 8). Sistem Informasi sebesar 6%;
3. Pada indikator Sasaran Meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara data pembentuknya adalah peningkatan kapasitas ASN yang diperoleh dari fasilitasi terhadap: 1). Pengembangan Kompetensi Formal dan Non Formal; 2). Pengembangan Kompetensi terintegrasi; 3). Pengembangan Kompetensi lain yang diselenggarakan oleh instansi pembina;
4. Pada indikator sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah, data pembentuknya diperoleh dari evaluasi terhadap komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja, dimana penilaian dilakukan oleh Inspektorat Daerah kota Blitar sebagai evaluator dalam menentukan keberhasilan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
5. Pada IKK Rasio pendidikan tinggi dan menengah, data pembentuknya adalah penghitungan terhadap jumlah ASN yang telah menempuh pendidikan minimal Diploma, pada penghitungan ini hanya terbatas pada pegawai diluar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan;
6. Pada IKK Rasio tenaga fungsional, data pembentuknya diperoleh dari penjumlahan pegawai dengan jabatan fungsional tertentu,

baik murni maupun tenaga fungsional hasil penyetaraan diluar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dilingkungan Pemerintah Kota Blitar;

7. Pada IKK Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi, data pembentuk diperoleh dari pendataan terhadap pejabat Fungsional tertentu yang telah mengikuti diklat fungsional jabatan, uji sertifikasi kompetensi jabatan dengan dibuktikan kepemilikan tanda lulus dan atau sertifikat kompetensi jabatan tersebut;

Realisasi Indikator yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan antara lain:

1. Indikator sasaran sekaligus yang menjadi IKU BKPSDM yaitu *Meningkatnya tata kelola kepegawaian sesuai dengan prinsip – prinsip manajemen kepegawaian yang baik* tidak tercapai dikarenakan terdapat revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yang berujung pada pembubaran Komisi Aparatur Negara yang berwenang menilai Sistem Merit, maka tahun 2024 Pemerintah Kota Blitar menggunakan hasil penilaian Indeks Sistem Merit tahun 2023 sesuai Surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 85/KEP.KSN/C/VII/2023 Tanggal 12 Juli 2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN dilingkungan Pemerintah Kota Blitar, dengan nilai 271,50 dengan indeks 0,66 kategori III (baik). Dengan target tahun 2024 sebesar 280, tercapai 96,96%;
2. IKK *Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/dasar* tidak tercapai, dengan target tahun 2024 sebesar 95,94% terealisasi sebesar 64,39% hal tersebut karena tingkat pendidikan pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional terampil memang cukup mensyaratkan pada pendidikan SMA, sehingga meskipun dibawah target yang ditetapkan namun tidak mempengaruhi kinerja organisasi;
3. IKK *Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi* tidak tercapai, dengan target tahun 2024 sebesar 46,47% terealisasi sebesar 37,37% hal tersebut karena jumlah pejabat fungsional bertambah baik dari kebijakan penyetaraan maupun recruitment pegawai baru, namun hal tersebut tidak diimbangi oleh meningkatkan diklat fungsional dan uji sertifikasi kompetensi fungsional yang diadakan oleh instansi pembina diatasnya dalam hal ini Lembaga/Kementerian pembinaanya.

Realisasi Indikator yang memenuhi target kinerja yang direncanakan antara lain:

1. Indikator Tujuan Renstra yaitu *Indeks Profesionalitas ASN* dengan target tahun 2024 80,30 terealisasi 86,65 atau tercapai 107,91%;
2. Indikator sasaran sekaligus yang menjadi IKU BKPSDM yaitu *Persentase ASN yang Mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN* dengan target tahun 2024 49% terealisasi sebesar 87,10%;
3. Indikator sasaran *Nilai SAKIP Perangkat Daerah* dengan target tahun 2024 mendapat Nilai A dengan 85,36 terealisasi 86,47;
4. IKK *Rasio Pegawai fungsional* dengan target tahun 2024 sebesar 22,25% terealisasi 22,85% hal tersebut karena jumlah pejabat fungsional bertambah baik dari kebijakan penyetaraan maupun recruitment pegawai baru

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada tahun 2024 antara lain:

1. Belum memiliki aplikasi internal untuk menilai capaian kinerja mandiri untuk penilaian Sistem Merit;
2. Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan untuk seluruh jabatan;
3. Kualifikasi Program Studi/Jurusan yang diambil dengan jabatan serta Perguruan Tinggi yang bisa dijangkau tidak tersedia, sehingga tugas belajar terkendala;
4. Instansi Pembina (Kementerian) belum berperan aktif dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan serta uji kompetensi dan sertifikasi untuk jabatan Fungsional dibawahnya;
5. Belum disusunnya dokumen Human Capital Development Plan (HCDP) yang didalamnya terdapat Standar Kompetensi Jabatan seluruh jabatan sebagai tolok ukur kompetensi sehingga belum dapat menghitung evaluasi kesenjangan kompetensi sebelum dan sesudah pengembangan kompetensi.

Faktor pendorong tercapainya target kinerja pada tahun 2024 antara lain:

1. Adanya evaluasi kinerja secara periodik yang mampu menumbuhkan kesadaran ASN untuk meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN individu yang berimbas pada nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kota Blitar;
2. Dengan terbitnya Peraturan Kepala LAN RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi ASN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Memungkinkan pengembangan kompetensi dilakukan Pembelajaran terintegrasi baik klasikal, non klasikal baik tatap muka maupun secara hybrid.
3. Terdapat dukungan dari BPSDM Provinsi Jawa Timur pada BKPSDM Kota Blitar untuk pengembangan kompetensi ASN dilingkungan Pemerintah Kota Blitar (hadiah achievement award, dimana BKPSDM mendapat peringkat pertama se Jawa Timur) baik diklat mandatory untuk pejabat struktural, diklat teknis, diklat bagi pejabat fungsional dan pengembangan kompetensi lainnya;
4. Adanya komitmen pimpinan dalam pemantauan kinerja baik pada saat perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi. Terbangunnya koordinasi yang baik dengan Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk menindaklanjuti LHE SAKIP menjadi salah satu pendukung tercapainya implementasi SAKIP pada BKPSDM;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra antara lain:

1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN yang tinggi berdampak pada kinerja ASN sebagai pelayan publik, dengan nilai yang tinggi tentunya berbanding lurus dengan kemampuan dalam pelaksanaan tugas;
2. Nilai Indeks Sistem Merit yang belum rilis, menyebabkan belum terukurnya manajemen pengelolaan kepegawaian di lingkungan

Pemerintah Kota Blitar, sehingga strategi dalam pengelolaan kepegawaian sulit untuk dianalisa dan ditarik kebijakan selanjutnya;

3. Masih minimnya peran aktif Kementerian dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan serta uji kompetensi dan sertifikasi untuk jabatan Fungsional dibawahnya, dapat menghambat karir Pejabat Fungsional;
4. Adanya komitmen pimpinan dalam pemantauan kinerja baik pada saat perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi, mampu meningkatkan kinerja organisasi;

Kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil setelah menganalisa capaian kinerja diatas antara lain:

1. Melaksanakan assessment bagi pelaksana, pengawas, administrator dalam proses pengisian jabatan administrator dan pengawas;
2. Mengembangkan talentpool untuk penilaian kompetensi bagi seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Blitar;
3. Melaksanakan Pengadaan sarana prasarana kantor atas kondisi peralatan kerja yang membutuhkan peremajaan;
4. Menyusun dokumen Human Capital Development Plan untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi dan menciptakan jalur karir pegawai;
5. Pemanfaatan pengembangan kompetensi terintegrasi secara digital/hybrid untuk mengatasi keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah dalam meningkatkan pengembangan kemampuan pegawai;
6. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian secara digital dengan terus melakukan pengembangan aplikasi siko.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah

Dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2026, dilakukan terlebih dahulu dengan inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD. Isu yang berkembang terkait pelayanan kepegawaian dan pendidikan pelatihan ASN adalah pada pemenuhan nilai Indeks Profesionalitas ASN baik individu maupun tingkat kota.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Blitar adalah:

1. Hasil Assessment administrator dan pengawas yang telah mencapai 3 (tiga) tahun penilaian, sehingga sudah tidak dapat digunakan secara ideal untuk menilai kapabilitas pegawai;
2. Belum memiliki dokumen perencanaan pengembangan kompetensi jangka menengah sebagai acuan pelaksanaan pengembangan kompetensi dan analisa kesenjangan;
3. Masih banyaknya tenaga fungsional tertentu yang belum memiliki sertifikasi kompetensi;

Tantangan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Blitar adalah:

1. Adanya kebijakan minus growth dimana penerimaan PNS baru harus lebih kecil dibandingkan dengan yang purna tugas (pensiun);

2. Penyetaraan jabatan menjadi tenaga fungsional yang tidak diimbangi dengan peran aktif kementerian pembinaanya.

Peluang Pengembangan Pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Blitar adalah

1. Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi dan mutasi jabatan dengan sistem merit melalui optimalisasi;
2. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat terkait dengan penerimaan dan penempatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan;
3. Peningkatan kinerja SDM Aparatur dalam rangka percepatan reformasi birokrasi berdasarkan *Road Map* reformasi birokrasi pemerintah Kota Blitar dalam bidang SDM aparatur, meliputi:
 - a. Penataan jumlah dan distribusi PNS melalui Kebijakan *Minus Growth* (penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun serta monitoring dan evaluasi redistribusi/ realokasi PNS;
 - b. Penguatan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Pemanfaatan secara luas *Assesment Center* dalam manajemen kepegawaian.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan hasil analisa terhadap Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025, Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026, serta isu-isu penting skala nasional, regional maupun lingkup kota yaitu:

1. Peningkatan kompetensi tenaga fungsional untuk pengembangan karir;
2. Rencana tindaklanjut keputusan penghapusan Pegawai Tidak Tetap.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka mendukung visi misi, tujuan dan sasaran pembangunan, Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2026 mengacu pada rancangan awal RKPD 2026 berpedoman pada tema pembangunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029, yang telah selaras dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi, *tema pembangunan Kota Blitar tahun 2026 “Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Pelayanan Dasar yang didukung kualitas SDM dan Infrastruktur yang berkelanjutan”*. Dengan *prioritas pembangunan nasional* yang sesuai tugas pokok dan fungsi BKPSDM yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), *sains*, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi Olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milineal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas” Prioritas pembangunan provinsi “memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif”. Mendukung prioritas pembangunan Kota Blitar yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik”.

Upaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2026 dalam memperkuat pondasi

Transformasi bidang Pelayanan melalui penyiapan SDM Aparatur yang profesional, kompeten, dalam pelayanan publik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual sesuai Tugas pokok dan fungsi BKPSDM dalam urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Review rancangan awal Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2026 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-masing Bidang di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya dengan *Program prioritas yang diampu BKPSDM* yaitu “Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia” sebagai berikut:

.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Blitar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				10.835.470.741	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				10.835.470.741	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				10.835.470.741	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				10.835.470.741	
	KEPEGAWAIAN				10.147.841.724	KEPEGAWAIAN				10.147.841.724	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100%	8.421.199.972	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100%	8.421.199.972	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	8.603.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	8.603.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.737.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.737.100	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	3.049.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	3.049.400	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	1.267.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	1.267.000	
	Penyusunan Dokumen	Kota Blitar, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain	10 Dokumen	1.900.000	Penyusunan Dokumen	Kota Blitar, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain	10 Dokumen	1.900.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kecamatan, Semua Kelurahan	Renstra PD dan Renja PD yang disusun			Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kecamatan, Semua Kelurahan	Renstra PD dan Renja PD yang disusun			
	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	650.000	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	650.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	7.819.881.957	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	7.819.881.957	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	7.818.081.957	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	7.818.081.957	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.800.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	100%	530.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	100%	530.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	530.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	530.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	103.701.100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	103.701.100	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	45.128.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	45.128.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semua Kelurahan					Semua Kelurahan				
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	55.373.100	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	55.373.100	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	3.200.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	3.200.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	271.535.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	271.535.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.417.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.417.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.744.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.744.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	28.800.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	28.800.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.378.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.378.400	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.754.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.754.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	200.001.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	200.001.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	439.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	439.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	23.888.415	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	23.888.415	
	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	23.888.415	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	23.888.415	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	111.914.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	111.914.400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	111.914.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	111.914.400	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100%	81.145.100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100%	81.145.100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	11.072.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	11.072.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	42.705.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	42.705.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 Unit	27.367.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 Unit	27.367.000	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	84,00%	1.617.723.196	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	84,00%	1.726.641.752	
			Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	90,00%				Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	90,00%		
			Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	4,16%				Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	4,16%		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Nilai Indeks Kualitas Data	93,65	715.243.796	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Nilai Indeks Kualitas Data	93,65	824.162.352	
			Persentase layanan pemberhentian pegawai	100%				Persentase layanan pemberhentian pegawai	100%		
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	219.971.400	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	219.971.400	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	128 Dokumen	13.643.900	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	128 Dokumen	13.643.900	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	291.081.444	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	400.000.000	terdapat penambahan alokasi belanja hibah KORPRI
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	190.547.052	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	190.547.052	
	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase penataan ASN sesuai kompetensi	80%	325.443.600	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase penataan ASN sesuai kompetensi	80%	325.443.600	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Blitar, Semua	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan	4 Dokumen	325.443.600	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Blitar, Semua	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan	4 Dokumen	325.443.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kecamatan, Semua Kelurahan	Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				Kecamatan, Semua Kelurahan	Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			
	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase ASN yang telah memiliki hasil assessment dan masih berlaku	4.16 %	517.092.800	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase ASN yang telah memiliki hasil assessment dan masih berlaku	4.16 %	517.092.800	
	Pengelolaan Assessment Center	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	512.917.600	Pengelolaan Assessment Center	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	512.917.600	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	45 Orang	4.175.200	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	45 Orang	4.175.200	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Pelaksanaan Dialog Kinerja dalam OPD dan Tim Kerja	90%	59.943.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Pelaksanaan Dialog Kinerja dalam OPD dan Tim Kerja	90%	59.943.000	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3100 Dokumen	21.950.500	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3100 Dokumen	21.950.500	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	7.996.600	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	7.996.600	
	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang	21.996.200	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang	21.996.200	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4 Laporan	7.999.700	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4 Laporan	7.999.700	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				687.629.017	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				687.629.017	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	52%	687.629.017	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	52%	687.629.017	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	38%				Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	38%		
			Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	18%				Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	18%		
			Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	80%				Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	80%		
	Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan Pengembangan Kompetensi Lainnya sesuai kebutuhan	85%	446.584.017	Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan Pengembangan Kompetensi Lainnya sesuai kebutuhan	85%	446.584.017	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	154.511.600	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	154.511.600	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1200 Orang	219.927.417	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1200 Orang	219.927.417	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pemerintahan Umum					
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	72.145.000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	72.145.000	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase ASN yang mengikuti diklat Kompetensi Manajerial dan Fungsional sesuai kebutuhan	18%	241.045.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase ASN yang mengikuti diklat Kompetensi Manajerial dan Fungsional sesuai kebutuhan	18%	241.045.000	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	241.045.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	241.045.000	
J U M L A H					10.726.552.185					10.835.470.741	

Tagging dukungan BKPSDM terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kota Blitar yaitu “Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis Smart Governance” dengan tujuan “Meningkatkan birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel” melalui pencapaian Sasaran “Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi” maka dalam Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2026 menuangkan dalam Progam Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan outcome sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, evaluasi dan layanan pengembangan kompetensi;
- 2. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian.

Dari tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 sesuai analisa kebutuhan Renja 2026 diatas jika dibandingkan dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 terdapat perubahan pagu indikatif atas belanja hibah KORPRI sehingga berdampak pada proporsi belanja tupoksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara menyeluruh.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari DPRD, kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun Perangkat Daerah dalam hal penyediaan panduan program, kegiatan dan sub kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.

Tabel 2.5

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Blitar

No	Usulan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1		2	3	4	5	6
1	Fasilitasi pada Lembaga KORPRI Kota Blitar	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN Sub Kegiatan: Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Blitar	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Hibah KORPRI

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar pada tahun 2026 tidak mendapat usulan Program, kegiatan, dan sub kegiatan dari dari Musrenbang RKPD maupun bersumber dari Pokok-pokok Pikiran DPRD, namun dari Lembaga KORPRI Kota Blitar.

Kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian salah satunya memfasilitasi lembaga profesi ASN yaitu KORPRI hal ini telah dituangkan dalam pasal 11 Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2022.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah 2026 ini, BKPSDM berpedoman pada arah kebijakan nasional/Program Strategis Nasional yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dalam Kabinet Merah Putih khususnya dengan menjabarkan Asta Cita sebagai landasan strategis untuk menjamin sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah. Prioritas nasional yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kota Blitar yaitu *Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.*

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, maka tagging atas tema, prioritas pembangunan, arah kebijakan Nasional dan tema RKP 2026, sesuai tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kota Blitar sebagai berikut:

1. Pencegahan tindak pidana korupsi;
memperhatikan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan sebagaimana diukur melalui Monitoring Center of Prevention (MCP) KPK, BKPSDM mengintervensi Manajemen ASN antara lain dalam hal: Perencanaan dan Pemenuhan SDM Aparatur, Kebijakan Promosi dan Mutasi Pegawai, Kepatuhan Penyampaian LHKPN serta Pendidikan Antikorupsi ASN.
2. Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja;
melalui Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai
3. Transformasi digital layanan publik prioritas;
melalui Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Adapun program nasional yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia termasuk dalam urusan wajib.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025 – 2029, yang menjadi tahun peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan tema: *“Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Pelayanan Dasar yang didukung kualitas SDM dan Infrastruktur yang berkelanjutan”*. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar mengemban tema pelayanan publik dan tata kelola mengarah pada isu strategis daerah dalam pemantapan penerapan *good governance* dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi. Dan berupaya dalam pencapaian misi 5 RPJMD *“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”*, maka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, bersih, profesional dengan pelayanan publik memenuhi harapan pengguna layanan menjadi penekanan pada tahun 2026 ini.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar dimaksudkan untuk:

1. Menjabarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar dalam Rencana Program/Kegiatan Prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun Anggaran 2026;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun Anggaran 2026;
3. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar;
4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar;
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumberdaya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *criteria specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented dan time bond serta continuously improve*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran sebagai penjabaran rencana strategis merupakan instrumen pencapaian visi dan misi Kota Blitar, visi adalah cara pandang jauh kedepan yang berisikan suatu gambaran menantang tentang cita dan citra atau keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi. Misi Kota Blitar yang menyatakan keterkaitan dengan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar adalah Misi ke 3, yaitu : *“Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang berbasis Smart Governance”*

Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, bersih, professional, berbasis *Smart Governance* sehingga pelayanan publik memenuhi harapan pengguna layanan.

Dalam mewujudkan misi tersebut serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur, maka tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar. yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2.1

Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Blitar

No	Tujuan	Target Akhir Tahun Rencana (2026)	Indikator Tujuan	Formulasi Perhitungan / Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	80,50	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai indeks yang menunjukkan kualitas profesionalitas ASN berdasarkan nilai kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan.

Tujuan yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar adalah “*Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara*” dimana tujuan tersebut telah sesuai dengan Visi Misi Walikota terpilih dan pada RPJMD Kota Blitar. Tujuan tersebut merupakan cita-cita Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan terus menjadi cita-cita Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar kedepan karena hal tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar 2025 - 2029.

Untuk mencapai tujuan tersebut langkah-langkah yang diambil oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar adalah dengan manajemen pegawai dimulai pada tahap rekrutmen, penempatan dan promosi pegawai sesuai dengan analisa jabatan atau kompetensi dan kebutuhan organisasi yang ada pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Dalam tujuan yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 yaitu Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai strategi-strategi dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud, dengan menuangkan dalam sasaran-sasaran kegiatan guna pencapaian tujuan atau cita-cita Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar.

Sasaran-sasaran yang dirumuskan untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian tertuang dalam Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025-2029. Dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah merumuskan secara menyeluruh program dan kegiatan yang terintegrasi dengan indikator kinerja utama selama 5 tahun perencanaan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.2
Tujuan dan Sasaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target		KET
					2024	2025	2026	2027	
1	Tujuan: Terwujudnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN. Pengukuran ini mencakup empat dimensi, yaitu: (1) Dimensi Kualifikasi (2) Dimensi Kompetensi (3) Dimensi Kinerja (4)Dimensi Disiplin 1. Dimensi Kualifikasi: mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS, dengan bobot penilaian sebesar 25%. 2. Dimensi Kompetensi: mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS, dengan bobot penilaian sebesar 40%. 3. Dimensi Kinerja: mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan bobot penilaian sebesar 30%. 4. Dimensi Disiplin: mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS, dengan bobot penilaian sebesar 5% nilai Indeks Profesionalitas ASN dikeluarkan oleh BKN melalui apikasi siasn	Nilai Indeks Profesionalitas ASN yang diperoleh pada tahun n	86,65	86,75	86,85	87,00	
	Sasaran: Meningkatnya Tata Kelola Kepegawaian sesuai dengan Prinsip-Prinsip Manajemen Kepegawaian yang Baik	Indeks Sistem Merit	Sistem Merit merupakan kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan Indeks Sistem Merit merupakan penilaian terhadap 8 aspek sistem merit dengan pembobotan sebagai berikut: 1) perencanaan kebutuhan 10%; 2) pengadaan 10%; 3) pengembangan karier 30%; 4) promosi dan mutasi 10%; 5) manajemen kinerja 20%; 6) penggajian, penghargaan dan disiplin 10%; 7) perlindungan dan pelayanan 4%; dan 8) sistem informasi 6%. Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit yaitu: Kategori IV nilai 325-400 (Sangat Baik), Kategori III nilai 250-324 (Baik), Kategori II nilai 175-249 (Kurang), dan Kategori I nilai 100-174 (Buruk) Nilai Indeks Sistem Merit diperoleh dari penilaian BKN	Nilai Indeks Sistem Merit yang diperoleh pada tahun n	271,50	271,50	280	290,00	IKU

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah provinsi Jawa Timur yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta berdasar kan arah kebijakan RPD, serta isu strategis di tahun 2026, tema pembangunan daerah Kota Blitar tahun 2026 adalah Penguatan Pondasi Transformasi bidang pelayanan dasar didukung kualitas SDM dan Infrastruktur yang berkelanjutan, prioritas pembangunan Kota Blitar, yaitu:

- 1. Revitalisasi Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan
- 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
- 3. Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan
- 4. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif
- 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.3
Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Visi	: Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan			
Misi	: Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis Smart Governance			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Terwujudnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Meningkatnya Tata Kelola Kepegawaian sesuai dengan Prinsip-Prinsip Manajemen Kepegawaian yang Baik	Peningkatan Kualitas Sistem Manajemen Kepegawaian	Meningkatkan Tata Kelola Pengembangan Karir	Program Kepegawaian Daerah
			Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	
			Meningkatkan Layanan Pengembangan Kompetensi ASN	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan untuk menilai kinerja keberhasilan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator Kinerja Kunci Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.4
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2026-2027

No	IKK	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target	
				2024	2025	2026	2027
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	pedoman yang dirancang untuk menjamin tata kelola ASN yang efektif, efisien, profesional, dan akuntabel di instansi pemerintah. NSPK bertujuan untuk menciptakan sistem manajemen ASN yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pelayanan publik, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta menjaga integritas dalam pengelolaan sumber daya manusia pemerintah.	Rilis nilai NSPK Manajemen ASN oleh Badan Kepagawaian Negara pada tahun berkenaan Kategori penilaian Berdasarkan Perka BKN nomor 12 tahun 2022: A= 85,01 - 100, B =70,01 - 85,00, C= 55,01 - 70,00, D= 40,01-55,00, E= 25,00 -40,00,	77,49	77,49	78,50	79,00

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi Kota Blitar di bidang kepegawaian serta tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun rencana kerja tahun 2026 dan menguraikan dalam 3 (tiga) program, 14 (empat belas) Kegiatan, 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan Pagu Anggaran Rp 12.852.510.463,- dengan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1					2	3	4
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	03				KEPEGAWAIAN		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2.01	0000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2.01	0003	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1					2	3	4
5	03	01	2. 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2. 0 2	0 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2. 0 2	0 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2. 0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2. 0 3	0 0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2. 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2. 0 5	0 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2. 0 5	0 1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2. 0 5	0 1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2. 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2. 0 6	0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2. 0 6	0 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2. 0 6	0 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2. 0 6	0 0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2. 0 6	0 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1					2	3	4
5	03	01	2.069	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2.0610	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2.0705	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2.0706	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2.0804	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2.0901	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2.0902	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	01	2.0906	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mendukung pencapaian tugas pokok fungsi dan IKK
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Mendukung Prioritas Pembangunan daerah dan IKK
						Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	
						Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Indeks Kualitas Data	Mendukung Prioritas Pembangunan daerah dan IKK
						Persentase layanan pemberhentian pegawai	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1					2	3	4
5	03	02	2. 0 1	0 0 3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Mendukung Prioritas Pembangunan daerah dan IKK
5	03	02	2. 0 1	0 0 6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Mendukung Prioritas Pembangunan daerah dan IKK
5	03	02	2. 0 1	0 0 8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Mendukung Prioritas Pembangunan daerah dan IKK
5	03	02	2. 0 1	0 0 0	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mendukung Prioritas Pembangunan daerah dan IKK
5	03	02	2. 0 2		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penataan ASN sesuai kompetensi	Mendukung Prioritas Pembangunan daerah dan IKK
5	03	02	2. 0 2	0 0 1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Mendukung Prioritas Pembangunan daerah dan IKK
5	03	02	2. 0 3		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah memiliki hasil assessment dan masih berlaku	Mendukung Prioritas Pembangunan daerah dan IKK
5	03	02	2. 0 3	0 0 2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Mendukung Prioritas Pembangunan daerah dan IKK
5	03	02	2. 0 3	0 0 4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Mendukung Prioritas Pembangunan daerah dan IKK
5	03	02	2. 0 4		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Dialog Kinerja dalam OPD dan Tim Kerja	Mendukung Prioritas Pembangunan daerah dan IKK
5	03	02	2. 0 4	0 0 2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Mendukung Prioritas Pembangunan daerah dan IKK
5	03	02	2. 0 4	0 0 4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Mendukung Prioritas Pembangunan daerah dan IKK
5	03	02	2. 0 4	0 0 7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Mendukung Prioritas Pembangunan daerah dan IKK
5	03	02	2. 0 4	0 0 8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Mendukung Prioritas Pembangunan daerah dan IKK
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	Mendukung Prioritas Pembangunan daerah dan IKK
						Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1					2	3	4
						Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	
						Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan Pengembangan Kompetensi Lainnya sesuai kebutuhan	Mendukung Prioritas Pembangunan daerah dan IKK
5	04	02	2.01	0010	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Mendukung Prioritas Pembangunan daerah dan IKK
5	04	02	2.01	0013	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Mendukung Prioritas Pembangunan daerah dan IKK
5	04	02	2.01	0014	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Mendukung Prioritas Pembangunan daerah dan IKK
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti diklat Kompetensi Manajerial dan Fungsional sesuai kebutuhan	Mendukung Prioritas Pembangunan daerah dan IKK
5	04	02	2.02	007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Mendukung Prioritas Pembangunan daerah dan IKK

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2026 merupakan bentuk tindaklanjut atas evaluasi kinerja atas capaian tahun n-2, yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Rencana Tindaklanjut LKjIP 2024 pada Renja BKPSDM
Tahun 2026

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN	meningkatkan capaian nilai Indeks Profesionalitas ASN melalui sosialisasi ke seluruh ASN terutama pada pelaporan kinerja melalui pembentukan PIC dan monev pengukuran IP ASN	Program : Kepegawaian Daerah
			Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
2	Meningkatnya tata kelola kepegawaian sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen kepegawaian yang baik	1). Melengkapi penyusunan talent pool melalui assessment pegawai	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis
			Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center
		2). Menyusun dan melaksanakan strategi/program peningkatan kompetensi pegawai (diklat, praktik kerja/magang, coaching, mentoring) berdasarkan analisis kesenjangan secara terjadwal dan dievaluasi.	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis
			Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
			Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
		3). Mengimplementasikan kebijakan pola karier dengan mengacu pada manajemen talenta;	Program : Kepegawaian Daerah
			Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN
			Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center
			Kegiatan: Mutasi dan Promosi ASN
			Sub Kegiatan: Pengelolaan Mutasi ASN
		4). Melakukan assessment dalam proses pengisian jabatan administrator dan pengawas.	Program : Kepegawaian Daerah
			Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN
			Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Kegiatan: Mutasi dan Promosi ASN
		5). Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas permasalahan kinerja pegawai;	Sub Kegiatan: Pengelolaan Mutasi ASN
			Program : Kepegawaian Daerah
			Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		6). Memanfaatkan hasil penilaian kinerja untuk membangun manajemen talenta.	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			Program : Kepegawaian Daerah
			Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN
			Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center
			Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		8). Menyempurnakan dan mengembangkankan sistem informasi kepegawaian khususnya manajemen talenta;	Program : Kepegawaian Daerah
			Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN
			Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center
			Program : Kepegawaian Daerah
			Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			Kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
			Sub Kegiatan: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
3	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara	1) Memonitoring pelaksanaan pengembangan kompetensi dan hasil pengembangan kompetensi terhadap kinerja ASN.	Program : Kepegawaian Daerah
			Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN
			Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Sub Kegiatan: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
			Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
		2). Menyusun Kebijakan Coaching dan Mentoring bagi ASN dengan kriteria tertentu.	Program : Kepegawaian Daerah
			Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN
			Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			Sub Kegiatan: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
			Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
		3). Mengoptimalkan penggunaan aplikasi manajemen talenta sebagai sarana untuk mengetahui data talenta secara realtime, menjaga kualitas talenta, meningkatkan motivasi dan kinerja talenta serta memberikan kepastian arah pengembangan karir talenta melalui aplikasi manajemen talenta di SIKOI.	Program : Kepegawaian Daerah
			Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN
			Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center
			Program : Kepegawaian Daerah
			Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			Kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
			Sub Kegiatan: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
		4). Memberikan akses, kemudahan, kecepatan dan transparansi kepada seluruh ASN untuk mendapatkan pelayanan yang adil dan berkualitas untuk memperoleh pengembangan kompetensi berupa BK CorpU dan Tugas Belajar melalui pemanfaatan aplikasi SMEDI SIKOI untuk seluruh Perangkat Daerah.	Program : Kepegawaian Daerah
			Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN
			Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			Sub Kegiatan: Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
			Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
		5). Perumusan pengembangan kompetensi ASN melalui penyusunan dokumen HCDP yang selaras dengan RPJMD.	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis
			Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			Sub Kegiatan: Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
			Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
			Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	1). Meningkatkan implementasi nilai – nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi disetiap tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2). Melakukan dialog Kinerja untuk menyusun rencana aksi organisasi.	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		3). Menyusun peta proses bisnis dan pohon kinerja secara lebih mudah dipahami dan dapat diukur.	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja dalam LKJIP 2024 tersebut diatas dan dengan berpedoman pada penyusunan KUAPPAS Tahun 2026 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2026 yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun rencana kerja tahun 2026 dan menguraikan sebagai berikut:

Tabel. 4.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju 2026
Kota Blitar

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				10.835.470.741				12.852.510.463
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				10.835.470.741				12.852.510.463
5	03				KEPEGAWAIAN				10.147.841.724				10.275.510.463
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku		100%	8.421.199.972			100%	9.002.510.463
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100%	8.603.500			100%	21.600.000
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	1.737.100	PENDAPATAN BAGI HASIL		3 Dokumen	7.500.000
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Laporan	3.049.400	PENDAPATAN BAGI HASIL		17 Laporan	3.500.000
5	03	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Berita Acara	1.267.000	PENDAPATAN BAGI HASIL		2 Berita Acara	3.500.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Perencanaan Perangkat Daerah								
5	03	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	1.900.000	PENDAPATAN BAGI HASIL		10 Dokumen	5.000.000
5	03	01	2.01	0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Berita Acara	650.000	PENDAPATAN BAGI HASIL		1 Berita Acara	2.100.000
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100%	7.819.881.957			100%	7.921.296.295
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 Orang/bulan	7.818.081.957	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		44 Orang/bulan	7.919.296.295
5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	1.800.000	PENDAPATAN BAGI HASIL		12 Laporan	2.000.000
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar		100%	530.000			-	750.000
5	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	530.000	PENDAPATAN BAGI HASIL			750.000
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100%	103.701.100			100%	146.000.000
5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	45.128.000	PENDAPATAN BAGI HASIL		2 Paket	48.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	55.373.100	PENDAPATAN BAGI HASIL		40 Orang	78.000.000
5	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	3.200.000	PENDAPATAN BAGI HASIL		40 Orang	20.000.000
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100%	271.535.500			100%	430.000.000
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	20.417.500	PENDAPATAN BAGI HASIL		1 Paket	48.000.000
5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	4.744.800	PENDAPATAN BAGI HASIL		1 Paket	7.500.000
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Paket	28.800.000	PENDAPATAN BAGI HASIL		56 Paket	35.000.000
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	14.378.400	PENDAPATAN BAGI HASIL		2 Paket	35.000.000
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	2.754.000	PENDAPATAN BAGI HASIL		12 Dokumen	3.500.000
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 Laporan	200.001.800	PENDAPATAN BAGI HASIL		40 Laporan	300.000.000
5	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	439.000	PENDAPATAN BAGI HASIL		1 Dokumen	1.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Semua Kelurahan						
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100%	23.888.415			100%	170.998.568
5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	-	PENDAPATAN BAGI HASIL		2 Unit	60.000.000
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	23.888.415	PENDAPATAN BAGI HASIL		4 Unit	110.998.568
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100%	111.914.400			100%	116.914.400
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	111.914.400	PENDAPATAN BAGI HASIL		12 Laporan	116.914.400
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan		100%	81.145.100			100%	194.951.200
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	11.072.500	PENDAPATAN BAGI HASIL		1 Unit	56.000.000
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	42.705.600	PENDAPATAN BAGI HASIL		2 Unit	70.028.800
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 Unit	27.367.000	PENDAPATAN BAGI HASIL		79 Unit	32.922.400

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi		84,00%	1.726.641.752			86,00%	1.273.000.000
						Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik		90,00%				91,00%	
						Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya		4,16%				8,32%	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Indeks Kualitas Data		93,65	824.162.352			93,68	670.000.000
						Persentase layanan pemberhentian pegawai		100%				100%	
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	219.971.400	PENDAPATAN BAGI HASIL		2 Dokumen	350.000.000
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	128 Dokumen	13.643.900	PENDAPATAN BAGI HASIL		86 Dokumen	20.000.000
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lembaga	400.000.000	PENDAPATAN BAGI HASIL		1 Lembaga	-
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	190.547.052	PENDAPATAN BAGI HASIL		2 Dokumen	300.000.000
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penataan ASN sesuai kompetensi		80%	325.443.600			80%	380.000.000
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	325.443.600	PENDAPATAN BAGI HASIL		4 Dokumen	380.000.000
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah memiliki hasil assessment dan masih berlaku		4.16 %	517.092.800			4.16%	75.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	512.917.600	PENDAPATAN BAGI HASIL		2 Dokumen	55.000.000
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Orang	4.175.200	PENDAPATAN BAGI HASIL		45 Orang	20.000.000
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Dialog Kinerja dalam OPD dan Tim Kerja		90%	59.943.000			90%	148.000.000
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3100 Dokumen	21.950.500	PENDAPATAN BAGI HASIL		3000 Dokumen	58.000.000
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	7.996.600	PENDAPATAN BAGI HASIL		100 Orang	12.000.000
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	21.996.200	PENDAPATAN BAGI HASIL		100 Orang	48.000.000
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	7.999.700	PENDAPATAN BAGI HASIL		4 Laporan	30.000.000
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				687.629.017				2.577.000.000
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan		52%	687.629.017			55%	2.577.000.000
						Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi		38%				36%	
						Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional		18%				18,50%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		80%				82%	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan Pengembangan Kompetensi Lainnya sesuai kebutuhan		85%	446.584.017			85%	1.077.000.000
5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	154.511.600	PENDAPATAN BAGI HASIL		1 Dokumen	37.000.000
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1200 Orang	219.927.417	PENDAPATAN BAGI HASIL		1200 Orang	950.000.000
5	04	02	2.01	0004	Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	72.145.000	PENDAPATAN BAGI HASIL		1 Dokumen	90.000.000
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti diklat Kompetensi Manajerial dan Fungsional sesuai kebutuhan		18%	241.045.000			19%	1.500.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	241.045.000	PENDAPATAN BAGI HASIL		5 Laporan	1.500.000.000
J U M L A H									10.835.470.741				12.852.510.463

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar tahun 2026 sebagai penjabaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2026. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024.

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

5.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2026, memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2026 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam menghadapi tugas perencanaan yang semakin kompleks, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Dalam rangka sinergitas perencanaan untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, koordinasi dengan perangkat

- daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses perencanaan, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
 3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan dalam rangka melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana
 4. Dengan ditetapkannya Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar tahun 2026. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.